

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit. Artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafie (1998:18) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pemerintahan pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara baik dan benar. Dari pengertian yang dirujuk ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Suryaningrat (1978:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lai, pemerintah adalah sekelompok individu yang

mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (Nugroho, 2003: 36).

Menurut Ndraha (2005 : 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, Syafiie (2005 : 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat , menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non – pemerintah, atau yang akan lebih baik .
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan skunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat ; semangkin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*serving*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan

Negara diseluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dan diaplikasikan secara luas, baik dibidang privat, public maupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position* dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Konsep Kebijakan Publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (Greek) artinya "Negara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu Politia atau negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:29). Kemudian dalam bahasa Indonesia "Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan" Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris "*wisdom*". Asal katanya "*Wise*". Dan pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar "pintar atau cerdas (*smart*)".

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang

menpunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:7).

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Nugroho (2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen didalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapantahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefmisikan pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004;1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan teretntu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelakasana dari suastu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran tang dimaksudkan. (Nurcholis, 2005;158).

Menurut (N. Dunn, 2000:23) Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program publik. Analisis kebijakaan dilakukan untuk

menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Richard Rose dalam Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu perilaku seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

3. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Josep (1996:20) mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut;

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatu pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut Tjahya (1996:20) Otonomi daerah berasal dari istilah “*Autos*” berarti sendiri, dan “*Nomos*” berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti “pemerintahan sendiri” dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

4. Konsep Peranan

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu; *Pertama*, penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya itu tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya begitu juga sebaliknya (Soekanto, 2004:243).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa (Depdikbud. 2002;852).

Menurut Effendi (2013:5) peran adalah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial; ia diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukannya tersebut. Dari sinilah kemudian muncul istilah dalam bahasa Inggris *role expectation* yaitu harapan mengenai peran seseorang dalam kedudukannya.

Soelaeman (1994:102) mengemukakan bahwa pelaksanaan suatu peranan tertentu tidak tampil dalam bentuk yang seragam, melainkan disamping berkaitan dengan siapa yang dihadapi atau dengan siapa ia berkomunikasi, tergantung juga dari situasi yang menyertai permainan peranan tersebut. Peranan itu dapat tampil sebagai suatu pola tingkah laku yang dianggap harus dilakukan seseorang untuk memantapkan kedudukannya.

Berdasarkan pendapat dan penjelasan diatas dapat disimpulkan peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

5. Pengelolaan (Manajemen)

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Terry dalam Hasibuan, (2012:2) adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Marwansyah (2010:3), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Menurut Alma (2008:142) fungsi manajemen sumber daya manusia adalah:

1. *Planning* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan persiapan masa depan kegiatan bisnis. *Planning* adalah suatu fungsi manajemen yang paling penting. Karena disini diformulasikan apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dimana dan caranya, dan bagaimana menilainya.
2. *Organizing and Staffing*, *Organizing* mencakup persiapan untuk melaksanakan planning menjadi kegiatan nyata. Tugas *organizing* ialah merancang suatu tim kerjasama, mengatur aturan otoritas dan komunikasi dalam berbagai jenjang organisasi. *Staffing* ialah memilih dan mengembangkan personil, terutama yang membantu ditingkat eksekutif formal.
3. *Coordinating*, Fungsi ini menyangkut mengintegrasikan berbagai unit yang berbeda, termasuk prosedur, orang, dan perencanaan. Makin besar organisasi, makin penting fungsi ini. Koordinasi harus ada pada setiap tingkat organisasi.
4. *Controlling*, artinya membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang diharapkan, yang telah ditetapkan. Ini tidak sama artinya dengan memberi perintah atau komando, yang banyak dilakukan oleh para pengawas.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi.

Manajemen sumber daya manusia harus di pandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya.

Menurut Mangkunegara, (2012:2) manajemen sumber daya merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Lebih lanjut manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Sesuai dengan Sutrisno, (2014:5) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Fathoni, (2006:10) manajemen sumber daya manusia adalah merupakan kekayaan yang paling penting, yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut.

Manajemen atau pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).

Menurut Melayu Hasibuan (2004:40-41) manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk

mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

3. Pengarahan

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai

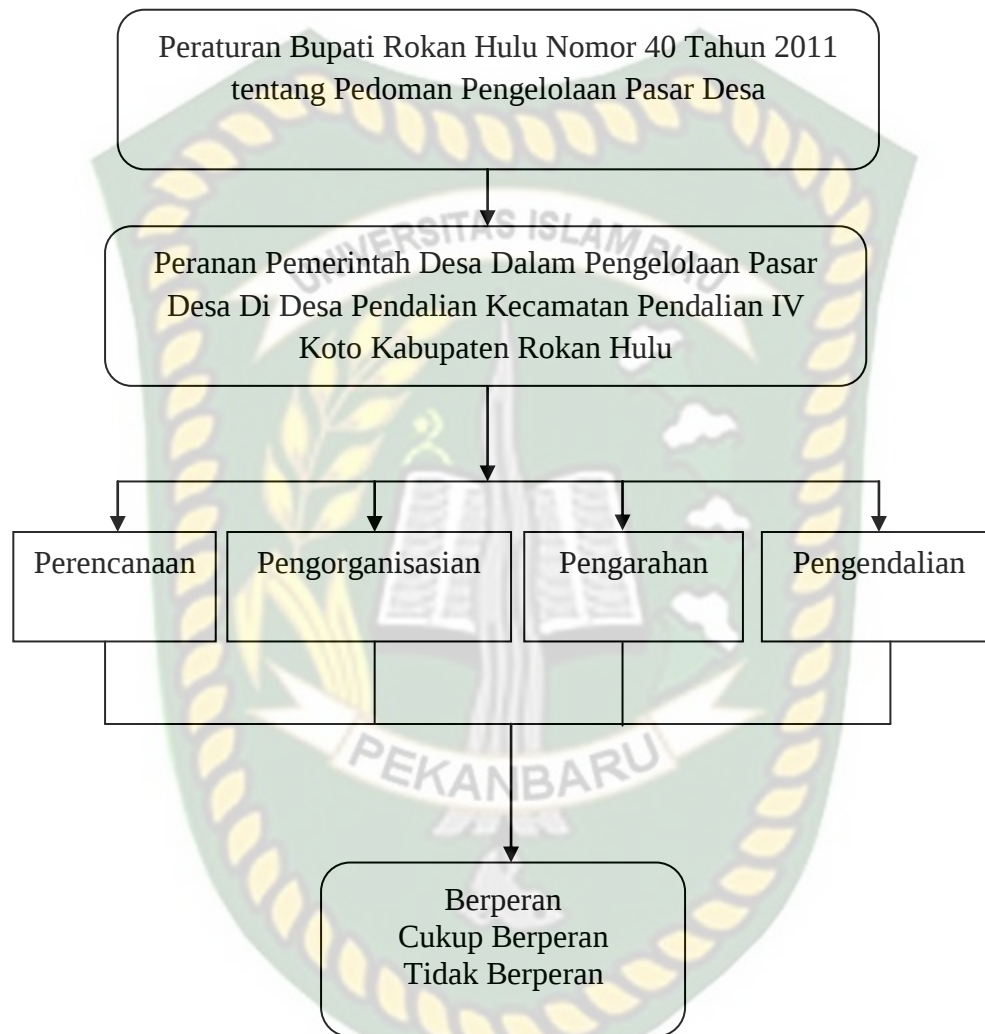
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan variable Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Dari penjelasan diatas bahwa Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diukur dengan indikator yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengendalian.

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber: Modifikasi Penulis 2016

C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.
3. Peran adalah sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.
4. Perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu
5. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

6. Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
7. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1. Operasional Variable Penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Nominal
1	2	3	4	5
Handoko, 2008:8. Manajemen atau pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Perencanaan	a.Adanya target yang dicapai b.Adanya pengelola retribusi c.Adanya SOP bagi petugas	Ordinal
		Pengorganisa sian	a.Adanya tim yang dibentuk untuk retribusi pasar b.Adanya pembagian tugas dan wewenang c.Adanya petugas pengawas	Ordinal
		Pengarahan	a.Adanya petunjuk pelaksana bagi petugas paker	Ordinal

1	2	3	4	5
			b. Adanya petunjuk tertulis untuk pegawai dalam pengelolaan retribusi pasar c. Jelasnya prosedur kerja bagi petugas paker maupun petugas pajak	
		Pengendalian	a. Adanya pemeriksaan pekerjaan petugas paker dilapangan b. Adanya pemeriksaan hasil pekerjaan pegawai yang menangani retribusi pasar c. Dilakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan pekerjaan pada petugas atau pegawai	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2017

E. Teknik Pengukuran

Ukuran variabel dalam penelitian ini adalah Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga (3) kategori, yaitu berperan, kurang berperan, dan tidak berperan, untuk mengarahkan penulis dalam menganalisis data, dikatakan:

Berperan : Apabila seluruh item penilaian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Kurang Berperan : Apabila hanya sebagian item penilaian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Kurang terlaksana jika berada pada rata-rata persentase 34-66 %.

Tidak Berperan : Apabila tidak satupun item penilaian Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak terlaksana jika berada pada rata-rata persentase $< 33\%$.

Sedangkan untuk pengukuran masing-masing indikator dalam variabel implementasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67 \%$.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 66% .

Tidak Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33 \%$.

2. Pengorganisasian

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67 \%$.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 66% .

Tidak Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33 \%$.

3. Pengarahan

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67 \%$.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 66% .

Tidak Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33 \%$.

4. Pengendalian

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67 \%$.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34% - 66% .

Tidak Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $\leq 33 \%$.

